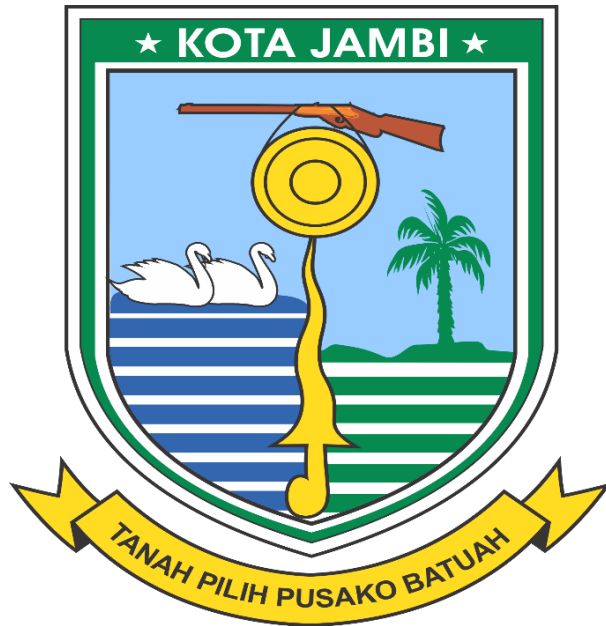


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA JAMBI**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II huruf D dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan laporan setiap tahunnya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jambi sebagai salah satu komponen dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Jambi Tahun 2025. Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Pemerintah. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,



Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Struktur Organisasi.....	8
1.2 Tugas dan Fungsi.....	10
1.3 Isu-Isu Strategis.....	10
1.4 Kepegawaian.....	11
1.5 Keadaan Sarana Prasarana	13
1.6 Keuangan.....	15
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	15
BAB II.....	17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	17
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah.....	18
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	278
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	35
3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	36
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan	39
Tahun Lalu.....	39
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target.....	410
Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	410
Perangkat Daerah.....	410
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi.....	42
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan	43
Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	43
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan.....	47
Pencapaian Perjanjian Kinerja	47
3.2 Realisasi Anggaran 2025.....	49
4.1 Kesimpulan.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai pada DPMPPA Kota Jambi	12
Tabel 1. 2 Daftar Jenis Barang dan Kondisinya per 31 Desember 2025	13
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis DPMPPA Kota Jambi Tahun 2025-2029	18
Tabel 2. 2 Strategi, Program dan Kegiatan	20
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	255
Tabel 2. 4 Target Belanja DPMPPA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025	27
Tabel 2. 5 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis	28
Tabel 2. 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	29
Tabel 3. 1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja.....	33
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	36
Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025	37
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	40
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja.....	41
Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi	46
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Belanja DPMPPA	49
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	9
Gambar 3. 1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target..	42

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

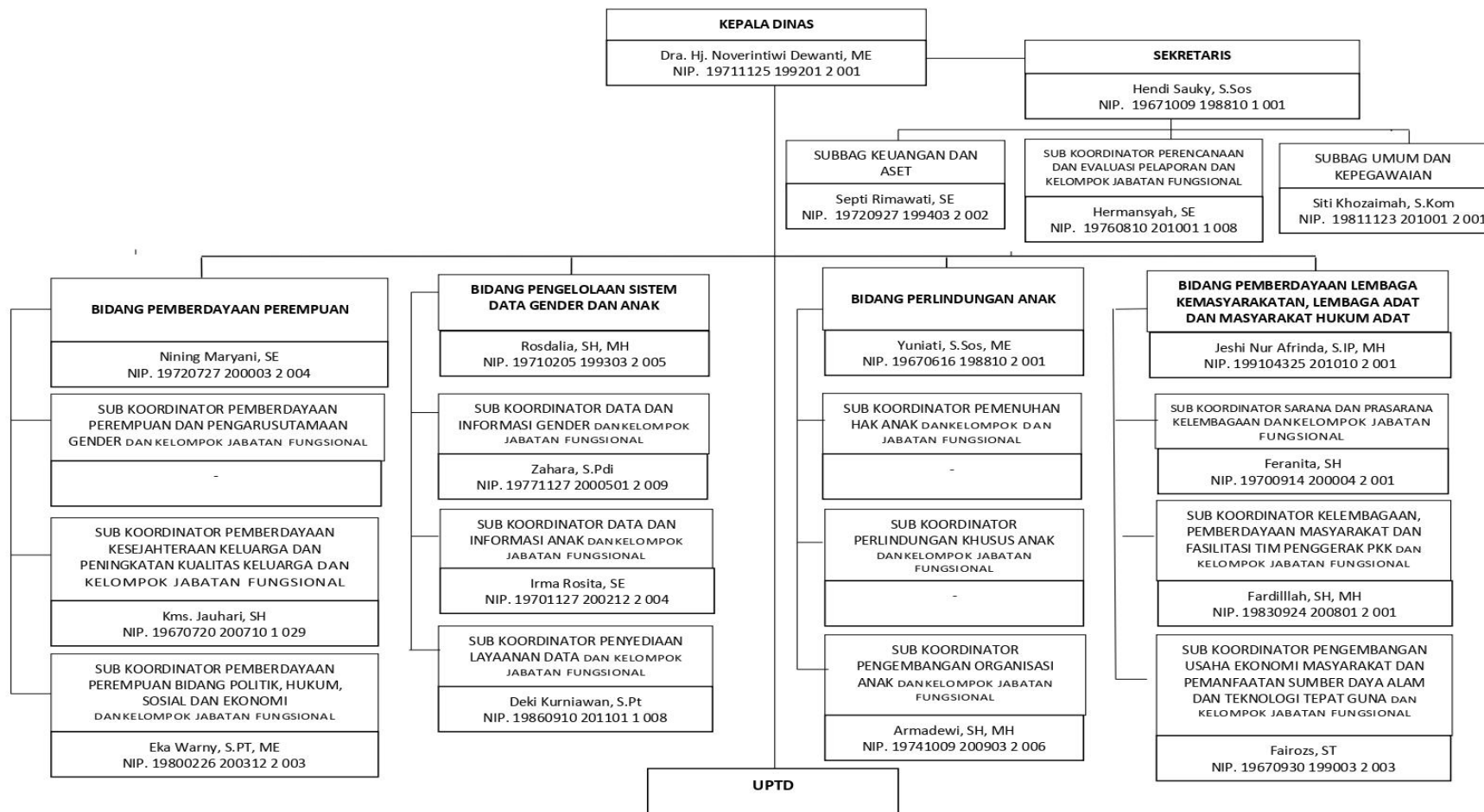
Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disusun, menyampaikan capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Daerah periode tahun 2024 – 2026 ini disusun berdasarkan dengan RPJMD tahun 2025 – 2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, adalah sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, yang diturunkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi, dipimpin oleh Dra. Hj. Noverintiwi Dewanti, ME yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi sesuai dengan peraturan walikota di atas.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya kasus kekerasan, rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak anak, serta belum optimalnya ketahanan keluarga. Isu-isu ini diatasi melalui peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan yang memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal dan masih seringkali masyarakat tidak diposisikan sebagai subjek pembangunan.
4. Perdagangan orang (trafficking) Masih banyaknya pintu masuk perdagangan orang, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, yang menyulitkan pengendalian.

5. Peningkatan kualitas hidup perempuan: Isu ini mencakup peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidupnya.
6. Peningkatan kualitas SDM Peningkatan sumber daya manusia yang bertugas dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
7. Belum optimalnya penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, KDRT dan kasus trafficking, serta Penanganan kasus-kasus permasalahan anak.
8. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, rendahnya komitmen pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah) dalam pengembangan usaha dan pembangunan partisipatif dan kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam proses pembangunan.
9. Terbatasnya alokasi anggaran daerah untuk program pemberdayaan, kurangnya sarana prasarana dan kualitas aparatur dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah (SKPD).
10. Masih rendahnya akses UMKM terhadap modal, bahan baku, teknologi, dan pasar, belum tumbuhnya wirausaha baru dan daya saing UMKM dan belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
11. Ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan gender, masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya pemenuhan hak anak, peran perempuan dalam pembangunan belum optimal dan menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai filosofi adat.
12. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengefektifkan pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
13. Keterbatasan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sumber daya manusia dengan jumlah 91 Orang. Pada Tahun 2025 terdapat 91 Pegawai yang terdiri dari 25 Orang PNS dan 66 Orang PPPK. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai perempuan yaitu sebanyak 57% (52 Orang) dan sisanya sebanyak 43% merupakan pegawai laki-laki (39 Orang).

Tabel 1. 1

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Eselon
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV.a	2
5.	Staf Fungsional Tertentu	IV.a	8
6.	Kepala UPTD	IV.a	1
7.	Kasubbag TU UPTD	IV.b	1
8.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	IX	41
9.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	VII	4
10.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	V	17
11.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	III	4
12.	Staf Fungsional Umum	-	8
Jumlah		-	91

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPPA Kota Jambi Tahun 2025

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 2

Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Roda Dua	17
2	Roda Empat	9
3	Komputer PC	12
4	Lap Top	31
5	Printer	28
6	Kamera Digital	2
7	Telepon PABX system 4 line	1
8	Kursi kerja sandaran tinggi	25
9	Kursi kerja sandaran rendah	8
10	Kursi komputer	6
11	Kursi lipat	96
12	Meja	9
13	komputer	34
14	Meja ½ biro	15
15	Meja Biro	4
16	Meja Rapat	16
17	Lemari Arsip	8
18	Kursi Tamu	70
19	Kursi Lipat	100
20	Kursi Rapat	2
21	TV	1
23	Faxsimile	36
24	AC	10

25	Dispenser	4
26	Papan Data	2
27	Lambang Negara	1
28	Bendera Merah Putih	1
29	Magic Jar	1
30	Brankas	6
31	Jam Dinding	3
32	Papan Pengumuman	1
33	Rak Gantung	10
34	Hardisk External	2
35	Alat Pemadam Kebakaran	1
36	Teralis	2
37	Hordeng	1
38	Lemari Pakaian	1
39	Lemari Cenderamata	1
40	Lemari Galeri Sekretariat PKK	1
41	Karpet	2
42	Panggung Pelaminan Adat	11
43	Infokus	1
	Papan Merk	2

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 12.113.880.000**. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategis pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 - 2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi:

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan

5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut di atas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan pelayanan prima, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.”

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

**Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 – 2029**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender	IKG = $\frac{IPG \text{ Perempuan}}{IPG \text{ Laki-Laki}}$	0.358	0.350	0.350	0.347	0.342
	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Penilaian APE berdasarkan 7 prasyarat: 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Pelembagaan 4. Sumber Daya. 5. Data Terpilih 6. Alat Analysis 7. Partisipasi Masyarakat	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah Total Nilai 5 Variabel KLA x 100% : Konstanta 1000	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama
	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	Jumlah RT yang Memenuhi Keselarasan Kampung Bahagia dibagi (:) Jumlah RT yang Melaksanakan Kampung Bahagia	80%	80%	82%	85%	87%

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Strategi, Program dan Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

	- Perlindungan Perempuan	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan: - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	- Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak

		Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan DRPPA - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kegiatan: Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	- Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan: Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten atau Kota

		Sub Kegiatan: - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kegiatan: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
	- Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten atau Kota Sub Kegiatan: - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

		Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten atau Kota
	- Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	- Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kegiatan: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perubahan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.358
	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Predikat	Madya
	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Utama
	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	%	80

Untuk mencapai Indikator Sasaran 1 “Indeks Ketimpangan Gender (IKG)” didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Indikator Sasaran 2 “Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)” didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Perlindungan Perempuan.

Untuk mencapai Indikator Sasaran 3 “Predikat Kota Layak Anak (KLA)” didukung oleh Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Khusus Anak. Selanjutnya program kedua adalah Peningkatan Kualitas Keluarga dengan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota. Indikator Sasaran 4 “Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia” didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	80
Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	100

Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Persen	100
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	Persen	70
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	Persen	45
Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen	90
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	Persen	35

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 13.123.980.000, - dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 12.672.590.569, - dan Belanja Modal sebesar Rp 451.389.431, -. Sedangkan anggaran perubahan menjadi Rp 12.113.880.000 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 11.435.080.661 dan belanja modal sebesar Rp 678.799.339, -.

Tabel 2. 4
Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasi	11.435.080.661	94,39%
Belanja Modal	678.799.339	5,61 %
Jumlah	12.113.880.000	100%

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.395.141.589	19,7%
	Perlindungan Perempuan	308.594.545	2,54%
	Perlindungan Khusus Anak	443.878.613	3,66%
	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	443.558.231	3,66%
	Peningkatan Kualitas Keluarga	94.506.589	0,78%
	Pemenuhan Hak Anak	187.043.418	1,54%
	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	141.848.054	1,17%

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 8 program yang terdiri dari 19 kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:

Tabel 2. 6
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3. 1

Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA %CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target} \times 100\%)}{\text{Target}}$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IKG = IPG Perempuan dibagi (:) IPG Laki-Laki	0.358	-	-
	Predikat Penghargaan Parahita Eka Praya (APE)	Penilaian APE berdasarkan 7 prasyarat: 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Pelembagaan 4. Sumber Daya. 5. Data Terpilih 6. Alat Analisis 7. Partisipasi Masyarakat	Madya	-	-
	Predikat Kota Layak Anak	Jumlah Total Nilai 5 Variabel KLA x 100%: Konstanta 1000	Utama	Utama	100%
	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	Jumlah RT yang Memenuhi Keselarasan Kampung Bahagia dibagi (:) Jumlah RT yang Melaksanakan Kampung Bahagia	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, realisasi indikator sasaran indeks ketimpangan gender belum tersedia karena data baru akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret Tahun 2026.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan Pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah yang berhasil dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2021 dan 2023, Kota Jambi telah menerima penghargaan atas capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dengan peringkat Madya. Penilaian untuk penghargaan Parahita Ekapraya dilakukan dua tahun sekali. Sebagaimana agenda tahun 2025 akan dilaksanakan penilaian APE, namun agenda tersebut mengalami perubahan, dimana penilaian APE akan

dilaksanakan pada tahun 2026. Perubahan agenda tersebut dikarenakan adanya revitalisasi APE dan perubahan aplikasi APE. Untuk hasil evaluasi mandiri sementara tahun 2024, Kota Jambi berada pada nilai estimasi 944,91 dari nilai maksimal 1000. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Target dari indikator sasaran predikat kota layak anak pada tahun 2025 adalah kategori utama dengan range nilai 801 sampai dengan 900 dengan presentase 90 %, dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 811,29 dari nilai maksimal 1000. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Kota Jambi mendapatkan peringkat kategori **Utama** dengan persentase standar KLA sebesar 90%, hasil akhir tersebut telah diberikan oleh Kementerian pada bulan Agustus 2025.

Untuk persentase pelaksanaan kampung Bahagia memiliki realisasi sebesar 100% dari target 80% sehingga memiliki capaian target 125%, sesuai dengan peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori Sangat Baik. Cara pengukuran indikator ini yaitu jumlah RT yang memenuhi keselarasan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT dibagi dengan jumlah RT yang melaksanakan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT, ($67 : 67 = 100$) maka didapatkan hasil realisasi 100%.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang Memenuhi Keselarasan Kampung Bahagia dibagi (:) Jumlah RT yang Melaksanakan Kampung Bahagia	80%	100%	125%
Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak	90%	90%	100%
Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi	Jumlah OPD yang melaksanakan PUG dibagi (:) jumlah seluruh OPD	85%	100%	117%

Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas	Jumlah kualitas keluarga dibagi (:) jumlah kepala rumah tangga x 100%	45%	43,3%	96,22%
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Data Gender dan Anak	Jumlah Kualitas dan Kuantitas data dibagi (:) Nilai Seluruh data sesuai Indikator x 100 %	35%	31%	88,57%
Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	Jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi (:) Jumlah Kekerasan Perempuan yang di tangani x 100%	100%	100%	100%
Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh UPTD PPA	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dibagi (:) Jumlah anak Korban Kekerasan yang Tangani x 100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator Program persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan memiliki realisasi sebesar 100% dengan capaian 125% dari target sebesar 80%. Cara pengukuran indikator ini mengikuti perhitungan sasaran persentase keselarasan pelaksanaan kampung bahagia yaitu jumlah RT yang memenuhi keselarasan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT dibagi dengan jumlah RT yang melaksanakan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT, ($67 : 67 = 100\%$). Indikator persentase pemenuhan hak anak dengan realisasi capaian 100%, dalam Verifikasi Lapangan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025 Pemerintah Kota Jambi mendapat nilai sebesar 811,29 atau 90% dari nilai maksimal 1000.

Indikator program Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi. PUG adalah strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Jambi cukup baik, dapat terlihat dari komitmen perangkat daerah dalam membentuk SK Focal Point dan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender terhadap program kegiatan di masing-masing OPD. Capaian PUG Kota Jambi mengalami peningkatan, persentasenya meningkat dari 56% di tahun 2024 menjadi 100% di tahun 2025. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah mulai memahami pelaksanaan PUG dan penyusunan anggaran yang responsif gender

Capaian kualitas keluarga (Indeks Kualitas Keluarga) Kota Jambi cukup baik (berkembang) .Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman,

kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks Kualitas Keluarga kota Jambi berada pada angka 71,86 (realisasi 2024). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2 tahun terakhir. Lebih spesifik lagi mengenai angka tersebut menggunakan 3 indikator iBangga. Indeks ketentraman kota Jambi berada di 64,37 dinilai berdasarkan, menjalankan ibadah, memiliki akta nikah anak berusia 6-17 memiliki akta lahir, memiliki jamkes, tidak ada konflik keluarga, KK tidak cerai hidup. Indeks kemandirian Kota Jambi berada di angka 60,07 dinilai berdasarkan, memiliki penghasilan, makan beragam, rumah banyak huni, memiliki aset, anak usia 7-18 tahun tidak putus sekolah, tidak ada anggota keluarga yang sakit/disabilitas dan akses media online. Kemudian indeks kebahagiaan Kota Jambi berada pada angka 75 dinilai dari interaksi antar keluarga pada 6 bulan terakhir, pengasuhan anak bersama pada 6 bulan terakhir, rekreasi keluarga pada 6 bulan terakhir dan ikut serta gotong royong di lingkungan RT pada 6 bulan terakhir. Indeks pembangunan keluarga 2023 Kota Jambi lebih tinggi dari Provinsi dan nasional dengan angka 66,48 nasional 61 sementara Provinsi 50-an.

Indikator cakupan data gender dan anak memiliki realiasi sebesar 31% dari target sebesar 35%, dimana realisasi capaiannya sebesar 88,57%.

Indikator program cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% dari target sebesar 100%, capaian ini sesuai dengan yang telah di targetkan

Indikator persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh UPTD PPA memiliki realiasi sebesar dengan capaian 100% capaian ini sesuai dengan target yang telah di tentukan sebesar 100 %.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3. 3**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

INDIKATOR SASARAN	2024			2025			PERSENTASE REALISASI 2025 TERHADAP REALISASI 2024
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-	-	-	0.358	-	-
Predikat APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	944,91	Nindya (700-800)	118,11%	944,91	Madya (601-700)	134,98%	100%
Predikat Kota Layak Anak (KLA)	938,73	Nindya (701 -800)	117,3%	811,29	Utama (801-900)	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	-	-	-	100%	80%	125%	125%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 belum tersedia karena data akan baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret Tahun 2026. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena indikator sasaran ini baru digunakan pada tahun 2025.

Realisasi indikator sasaran Predikat APE (Anugerah Parahita Ekapraya) tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100. Capaian kinerja tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2023, Kota Jambi telah menerima penghargaan atas capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dengan peringkat Madya. Penilaian untuk penghargaan Parahita Ekapraya dilakukan dua tahun sekali. Sebagaimana agenda tahun 2025 akan dilaksanakan penilaian APE, namun agenda tersebut mengalami perubahan, dimana penilaian APE akan dilaksanakan pada tahun 2026. Perubahan agenda tersebut dikarenakan adanya revitalisasi APE dan perubahan aplikasi APE. Untuk hasil evaluasi mandiri sementara tahun 2024, Kota Jambi berada pada nilai estimasi 944,91 dari nilai maksimal 1000.

Capaian kinerja indikator sasaran persentase standar KLA dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar 100%. Dalam evaluasi mandiri Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 Pemerintah Kota Jambi mencapai nilai sebesar 938,73 dari nilai maksimal 1000. Hasil akhir dari evaluasi KLA telah diberikan oleh Kementerian PPPA pada bulan September Tahun 2025 dengan nilai evaluasi sebesar 811,29 dengan peringkat kategori Utama dengan persentase standar KLA sebesar 84,8%, nilai ini menurun dari nilai evaluasi mandiri namun tetap berada pada range peringkat Utama.

Indikator sasaran Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia ini juga merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2025, sehingga tidak ada capaian realisasi pada tahun 2024. Indikator sasaran ini memiliki capaian sebesar 100% dari target 80%. Cara

pengukuran indikator ini yaitu jumlah RT yang memenuhi keselarasan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT dibagi dengan jumlah RT yang melaksanakan kampung Bahagia yaitu sebanyak 67 RT, $(67 : 67 = 100)$ maka didapatkan hasil realisasi 100%.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

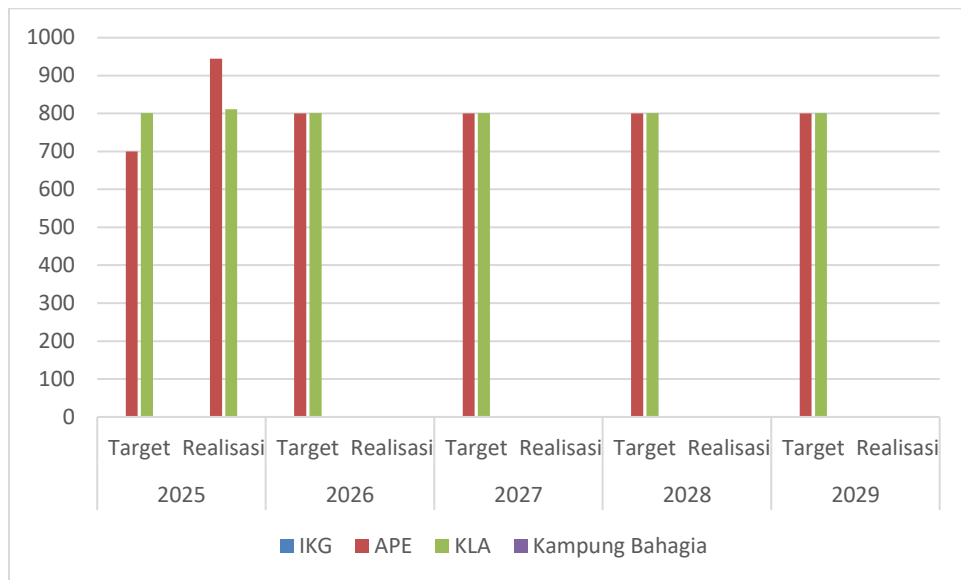
INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.358	-	0.350	-	0.350	-	0.347	-	0.342	-
Predikat APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	Madya (601 – 700)	944,91	Nindya (701 – 800)	-	Nindya (701 – 800)	-	Nindya (701 – 800)	-	Nindya (701 – 800)	-
Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Utama (801-900)	Utama (811,29)	Utama (801-900)	-	Utama (801-900)	-	Utama (801-900)	-	Utama (801-900)	-
Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	80%	100%	80%	-	82%	-	85%	-	87%	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 belum tersedia karena data akan baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Maret Tahun 2026.

Realisasi tahun 2025 Predikat Anugrah Parahita Ekapraya (APE) mendapatkan hasil evaluasi mandiri sebesar 944,91 dengan target nilai antara 601-700, bila dibandingkan dengan target renstra maka target telah tercapai.

Realisasi tahun 2025 Predikat Kota Layak Anak (KLA) mendapatkan predikat Utama, bila dibandingkan dengan target renstra maka target telah tercapai.

Realisasi indikator sasaran persentase pelaksanaan kampung Bahagia tahun ini memiliki realisasi 100% dari target 80%, bila dibandingkan dengan target renstra maka target telah tercapai.



Gambar 3. 1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Berdasarkan grafik 3.1, diketahui bahwa ada 4 (empat) indikator sasaran, target indikator sasaran pertama Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025 adalah 0.358, namun untuk capaian realisasi belum dapat dihitung karena data perhitungan belum dirilis dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya indikator sasaran kedua APE (Anugerah Parahita Ekapraya) memiliki capaian hasil evaluasi mandiri untuk Kota Jambi mendapatkan nilai sebesar 944,91 dari nilai maksimal 1000.

Capaian kinerja indikator sasaran ketiga predikat Kota Layak Anak KLA mendapatkan nilai 811,29 dari Kementerian PPPA dengan predikat Utama. Capaian kinerja indikator sasaran keempat, persentase pelaksanaan kampung Bahagia memiliki realiasi 100% dari target sebesar 80% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 125%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET NASIONAL/ PROVINSI	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	-	-
2	Predikat APE	-	944,91	-
3	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	11 Kab/Kota	Utama	-
4	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	-	100%	-

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi indikator sasaran tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi maka dapat dilihat untuk indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) belum adanya target dari nasional maupun provinsi dan juga data realiasi untuk Kota Jambi pada tahun 2025 karena data belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk capaian indikator sasaran predikat Kota Layak Anak (KLA) bila dibandingkan dengan target Provinsi dengan sasaran persentase Kab/Kota Layak Anak yang capaian bisa di hitung karna adanya perbedaan target yang di tetapkan. Dimana target yang di tetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah predikat sedangkan target yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi adalah jumlah. Namun kedua sasaran tersebut memiliki keterkaitan dan tujuan yang sama. Untuk capaian indikator sasaran persentase pelaksanaan kampung Bahagia, indikator ini tidak ada target provinsi/nasional karena merupakan program khusus Kota Jambi.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tantangan dalam pemberdayaan dengan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak Kota Jambi semakin dapat dirasakan dengan banyaknya kemajuan teknologi informasi dan peningkatan pendidikan dan pengetahuan rata-rata masyarakat. Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan antara lain disebabkan oleh:
 - Terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya.
 - Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan ekonomi.
 - Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial.
2. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan, dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini belum terlaksana dengan baik dimana permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Masih rendahnya pemahaman perempuan tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
 - Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia UPTD PPA dalam memberikan pelayanan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan terhadap perempuan.
 - Belum optimalnya kelompok PKDRT di Kecamatan dan Kelurahan.
 - Belum adanya mekanisme yang tepat dalam penyelesaian masalah.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Penggarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan peranan perempuan antara lain yaitu sebagai berikut:
- Belum optimalnya penerapan peranti hukum dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
 - Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
 - Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.
 - Belum optimalnya koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG).
4. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak:
- Belum optimalnya penerapan hukum
 - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan wilayah ramah anak
 - Belum optimalnya Kerjasama dan koordinasi tentang sectoral dalam pemenuhan hak-hak anak.
 - Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak.
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan:
- Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dalam peningkatan usaha ekonomi bagi masyarakat
 - Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi serta kelembagaan dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif dan peran masyarakat dalam pembangunan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Meningkatkan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan
2. Penguatan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kelurahan

3. Mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna menuju pengembangan usaha ekonomi masyarakat
4. Memperkuat peran gugus tugas Kota Layak Anak (KLA)
5. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
6. pada perangkat daerah
7. Bidang Perlindungan Perempuan dan bidang Perlindungan anak telah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kota Jambi tentang pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di kota Jambi agar Masyarakat semakin paham dalam melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan.
8. DPMPPA mengadakan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat baik manajemen maupun keterampilan dan kegiatan lainnya agar Masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya.
9. UPTD PPA telah membuat inovasi PITA MOLIN (Pelayanan, Informasi dan konsultasi melalui Mobil Perlindungan), yaitu Tim UPTD PPA terjun langsung ke sekolah-sekolah memberikan edukasi dan informasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan anak, mensosialisasikan adanya UPTD PPA Kota Jambi sebagai tempat pengaduan jika terjadi kekerasan, dengan inovasi diharapkan akan meminimalisasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Memperkuat peran focal point pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender
11. Memperkuat peran organisasi perempuan dalam PKDRT.
12. Penguatan peran kelembagaan dan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi pada tahun 2025:

Tabel 3. 5**Analisis Efisiensi**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA %	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	97,17%	-
	Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	100%	92,07 %	92,07%
	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	100%	97,21 %	97,21%
	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	125%	97,73%	100%

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Indeks Ketimpangan Gender belum tersedia karena data baru akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret Tahun 2026, sehingga tidak dapat dihitung tingkat efisiensinya.

Indikator Sasaran Predikat APE memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 92,07% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 92,07%.

Indikator Sasaran Predikat Kota Layak Anak (KLA) memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,21% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 97,21%.

Indikator Sasaran Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia memiliki capaian kinerja sebesar 125% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97,73% sehingga indikator ini dapat dikatakan efisien karena memiliki tingkat efisiensi sebesar 100%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tercapainya Indeks Ketimpangan Gender didukung oleh program Pengarusutamaan Gender dan program Peningkatan Kualitas Keluarga. Dengan kegiatan:

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini memiliki indikator Persentase Pelaksanaan PUG Kota Jambi memiliki kegiatan:
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator cakupan keluarga berkualitas memiliki kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota

Tercapainya Standar APE didukung oleh program Peningkatan Kualitas Keluarga, program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan program Perlindungan Perempuan. Dengan kegiatan:

- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator cakupan keluarga berkualitas memiliki kegiatan:
 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator meningkatnya kualitas dan kuantitas data gender dan anak dengan sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota.
- Program Perlindungan Perempuan
Program ini memiliki indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan, pada program ini terdapat kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi

kewenangan kabupaten/kota dengan indikator persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilayani.

Predikat Kota Layak Anak (KLA) oleh program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator persentase pemenuhan hak anak dan program Perlindungan Khusus Anak (PKA) yang memiliki indikator persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dengan kegiatan:

- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, DRPPA
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
- Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase penanganan kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti. Pada kegiatan ini terdapat sub kegiatan:
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Persentase pelaksanaan kampung bahagia didukung oleh Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dimana pada program ini terdapat sub kegiatan:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Sub kegiatan ini memiliki capaian berupa meningkatnya kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dimana capaian tersebut dapat mendukung tercapainya persentase pelaksanaan kampung bahagia.

- **Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja terlaksanya fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

- **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**

Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksanya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

- **Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**

Sub kegiatan ini memiliki capaian kinerja berupa terlaksananya fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 92,09% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi

Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	12.113.880.000	11.155.307.223	92,09%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.718.738.411	8.814.377.740	90,69%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.109.310.961	7.277.023.724	89,73%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.684.220	25.083.732	97,66%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.548.661	12.221.874	97,92%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.135.559	12.861.858	99,09%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.118.811.951	5.456.601.093	89,17%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.798.086.171	5.148.484.584	88,80%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	313.580.800	301.221.048	96,06%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.146.180	6.895.461	96,49%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.150.000	85.681.812	71,31%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70.150.000	66.666.600	95,03%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	19.015.212	38,03%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.329.151	399.032.433	91,24%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.086.533	14.118.090	87,76%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.321.973	221.986.491	86,60%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.890.645	18.179.475	91,40%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.880.000	32.740.914	99,58%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.150.000	112.007.463	99,87%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	572.406.339	548.909.956	95,89%
Pengadaan Mebel	231.234.549	220.024.200	95,15%
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	341.171.790	328.885.756	96,40%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.844.800	185.435.296	85,91%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.844.800	13.655.000	98,63%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.000.000	171.780.296	85,04%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.084.500	576.278.402	93,08%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	254.733.800	231.622.140	90,93%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.409.000	106.113.902	91,16%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.630.200	88.521.890	91,61%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.311.500	150.020.470	99,15%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	433.556.231	422.234.314	97,38%
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	130.160.244	126.975.210	97,55%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaran PUG Kewenangan Kab/Kota	130.160.244	126.975.210	97,55%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	303.395.987	295.259.104	97,32%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	303.395.987	295.259.104	97,32%
Program Perlindungan Perempuan	308.594.545	283.373.040	91,82%
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.997.700	64.389.640	99,06%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64.997.700	64.389.640	99,06%

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	243.596.845	218.983.400	89,89%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.337.145	59.129.900	87,81%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	176.259.700	159.853.500	90,69%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	94.506.589	90.885.728	96,16%
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.575.464	57.972.240	94,15%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	61.575.464	57.972.240	94,15%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.931.125	32.913.488	99,95%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.931.125	32.913.488	99,95%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	141.848.054	127.487.602	89,88%
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	141.848.054	127.487.602	89,88%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	141.848.054	127.487.602	89,88%
Program Pemenuhan Hak Anak	187.043.418	178.565.994	95,47%
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	187.043.418	178.565.994	95,47%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	187.043.418	178.565.994	95,47%
Program Perlindungan Khusus Anak	443.878.613	434.807.338	97,95%
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	186.269.715	185.044.235	99,34%
Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, dan DRPPA	121.267.415	120.051.935	99%
Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	65.002.300	64.992.300	99,98%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.208.898	161.832.569	95,64%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.178.596	53.057.569	91,20%
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	111.030.300	108.775.000	97,97%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	87.930.534	99,47%
Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	87.930.534	99,47%
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.395.141.589	2.340.929.483	97,73%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.395.141.589	2.340.929.483	97,73%

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.395.141.589	2.340.929.483	97,73%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.474.898.347	1.446.156.327	98,05%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	73.991.195	71.934.159	96,49%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	66.890.961	61.743.906	92,31%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	779.361.086	761.635.091	97,73%

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7

Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.358	-	-	100%	97,17%	97,17%
	Predikat APE	Madya (701-800)	944,91	100%	100%	92,07%	92,07%
	Predikat Kota Layak Anak	Utama (801-900)	938,73	100%	100%	97,21%	97,21%
	Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	80%	100%	125%	100%	97,73%	97,73%

Capaian Indikator sasaran Indeks Ketimpangan Gender (IKG) belum tersedia karena data baru akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret tahun 2026. Indikator sasaran ini memiliki anggaran sebesar 528.062.820 dengan realisasi sebesar 513.120.042 dengan capaian 97,17%.

Indikator sasaran tercapainya standar Anugerah Parahita Ekapraya (APE) memiliki capaian kinerja 100%. Indikator sasaran ini memiliki anggaran 544.949.188 dengan realisasi 501.746.370 dengan capaian 92,74%.

Indikator Sasaran Predikat Kota Layak Anak memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja 90% dari target sebesar 90%. Indikator sasaran ini memiliki anggaran sebesar 630.922.031 dengan realisasi anggaran sebesar 613.373.332 dengan persentase 97,21%.

Indikator sasaran persentase pelaksanaan kampung bahagia memiliki realisasi kinerja 100% dari target sebesar 80%, sehingga memiliki capaian kinerja sebesar 125%. Indikator sasaran ini memiliki anggaran sebesar 2.395.141.589 dengan realisasi 2.340.929.483 dengan capaian 97,73%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 ini, merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Indikator Sasaran 1 belum tersedia
- Indikator Sasaran 2 dengan capaian 100%
- Indikator Sasaran 3 dengan capaian 100%
- Indikator Sasaran 4 dengan capaian 125%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator sasaran tersebut, secara umum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.12.113.880.000- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.11.155.307.2223- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 958.572.777.-. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi 2025 - 2029 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2025, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Realisasi Indikator Sasaran 1 belum tersedia
- Indikator Sasaran 2 dengan capaian 100%
- Indikator Sasaran 3 dengan capaian 100%
- Indikator Sasaran 4 dengan capaian 125%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.113.880.000 untuk mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi adalah 92,09 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Jambi perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

4.2 Rencana Tindaklanjut

Adanya rekomendasi dari DPRD untuk membuat perencanaan untuk kegiatan musrenbang adat dan anak di kelurahan se-Kota Jambi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi telah menghimbau kelurahan se-Kota Jambi melalui surat resmi agar melibatkan Forum Anak dalam setiap pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Selain iitu, lembaga adat kelurahan jga dilibatkan oleh Lurah dalam Musrenbang Kelurahan sehingga aspirasi dan usulan dari seluruh unsur dapat disampaikan melalui forum tersebut.

Kota Jambi, Januari 2026
Kepala Dinas/Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi,

Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125 199201 2 001

Lampiran:



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

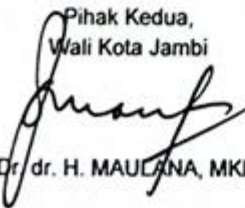
Nama : Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Jambi,
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM
Jabatan : Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala DPMPPA Kota Jambi

Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125199201 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,358 ✓
		Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Madya ✓
		Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Utama ✓
		Persentase Pelaksanaan Kampung Bahagia	80 ✓

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp. 8.109.310.961,-
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 433.556.231,-
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 308.594.545,-
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 94.506.589,-
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 141.848.054,-
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 187.043.418,-
7	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 443.878.613,-
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 2.395.141.589,-
TOTAL		Rp. 12.113.880.000,- ✓

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama
Kepala DPMPPA Kota Jambi

Dra. Hj. NOVERINTIWI DEWANTI, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19711125199201 2 001

TELAH DITELITI KEBENARANYA	
PERENCANA SISTEM MUDA	KAJIAN PEMERINTAHAN DAN PENGURUSAN MANUSIA
	TGL
	
DODY MULYANTO, SH	EDI HARSONI, SP, MM
NIP. 1961115 200303 012	NIP. 1961115 200303 012